

ABSTRAK

Enzam Nurzaman: Implementasi Kebijakan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka

Nilai jual objek pajak merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan harga tanah disuatu daerah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Majalengka merasa perlu mengeluarkan suatu produk kebijakan yang dapat melindungi hak-hak masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dan untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi dan juga bagaimana cara pemerintah mengatasi hambatan tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode implementasi Edward III yang terdiri dari Variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan masalah dalam implementasi Keputusan Bupati Nomor: 973/KEP.306-DPKAD Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka. Masalah yang ditemukan adanya komunikasi dan koordinasi antara aparaturnya desan, kecamatan dan Badan keuangan dan Arset Daerah (BKAD) yang menyebabkan informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tidak maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut BKAD menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan terkait kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pajak.

ABSTRACT

Enzam Nurzaman: The Implementation of Regent Policy Number: 973/KEP.306 –DPKAD About Determination of Sales Value of Taxable Object (NJOP) Land and Building Rural and Urban Areas in Majalengka

Sales value of taxable object is the important thing in determining the value of land in some areas. Therefore, Majalengka's district government is need to publish a policy that can protect the rights of society. The purpose of this research are to know the process of implementation of Regent Decree Number: 973/KEP.306-*DPKAD* by Office for Regional Finance and Assets in Majalengka and to know what are the barrier faced and how the government overcome those barrier.

This research uses the theory of implementation method of Edward III which consist of Variable Communication, Resources, Dispositions, and Bureaucratic Structure. This research uses descriptive method. It describes how the process of implementation of Regent Decree Number: 973/KEP.306-*DPKAD* About Determination of Sales Value of Taxable Object (*NJOP*) Land and Building Rural and Urban Areas in Majalengka. Then, it analyzed used SWOT. This method uses qualitative approach and technique of collecting data by interview.

The result of this research shows that it is found the problem in the implementation of Regent Decree Number: 973/KEP.306-*DPKAD* About Determination of Sales Value of Taxable Object (*NJOP*) Land and Building Rural and Urban Areas in Majalengka. There are found the communication and coordination between village and sub-district apparatus and Office for Regional Finance and Assets (*BKAD*) which cause the information is not properly conveyed to society as in line as expectation. To overcome those problems, *BKAD* prepares the tool of complaint for who are want to submit the policy.

Key words: *Implementation, Policy, Tax*